



RENJA

RANCANGAN RENCANA KERJA

SEKRETARIAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

Jalan A. Yani No. 01 Telp. (0526) 2028408 Paringin
Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos 71662

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Nya atas taufik hidayah dan karunia-Nya yang tak terhingga sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022 ini akhirnya dapat diselesaikan.

Sekretariat Daerah sekarang ini dalam menjalankan aktifitasnya menghadapi permasalahan baik berasal dari lingkungan internal maupun eksternal. Semakin besar kewenangan Sekretariat Daerah tersebut, semakin beragam pula kondisi lingkungan yang perlu dicermati secara seksama untuk mengeliminir kesalahan dalam proses pengambilan keputusan. Untuk itulah maka diperlukan suatu pola manajemen yang baik, meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Dari siklus ini bahwa perencanaan merupakan suatu hal yang sangat signifikan bagi keberhasilan Sekretariat Daerah dalam mencapai tujuannya.

Akhir kata, diharapkan semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat digunakan sebagai acuan/ pedoman dalam pelaksanaan anggaran di Sekretariat Daerah agar lebih efisien, efektif, partisipatif, dan akuntabel.

Parangin, 16 Mei 2022

Sekretaris Daerah,

Drs. H. Sutikno, AP., M.AP
Pembina Utama Muda (IV/d)
NIP. 19760417 199412 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	28
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	31
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	39
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	51
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	52
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	55
3.3 Program dan Kegiatan	58
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	60
BAB V. PENUTUP	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan merupakan dokumen perencanaan kerja untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan Sekretariat Daerah dalam periode Tahun Anggaran 2022.

Dalam Rancangan Awal Renja Sekretariat Daerah Tahun 2022 memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah pada Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian Visi dan Misi RPJMD 2021-2026 Pemerintah Kabupaten Balangan.

Semua Dokumen Perencanaan memiliki keterkaitan yang erat satu sama lainnya. SKPD menyusun Rencana Strategis (Renstra-SKPD) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Penyusunan Renstra-SKPD dimaksud berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu satu tahun mengacu kepada Renja pemerintah. Renja SKPD merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pengawasan. Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum (RKUA) APBD didasarkan pada RKPD yang telah disusun sebelumnya, yang kemudian RKUA inilah yang menjadi landasan penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2022 adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
20. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008

- tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44);
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
 22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44);
 24. Peraturan Bupati Balangan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2022 adalah untuk mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan dengan pengalokasian anggaran secara efektifitas dan efisien sehingga mewujudkan visi dan misi Sekretariat Daerah yang menunjang visi dan misi pemerintah Kabupaten Balangan.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rancangan Awal Renja Tahun 2022 ini diantaranya adalah:

1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas kegiatan antar Bagian, antar kegiatan, antar fungsi di Sekretariat Daerah;
2. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kegiatan;

3. Tercapainya penggunaan Sumber Daya secara efektif dan efisien.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rancangan Awal Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB VI. LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam penyusunan Renja 2022 tidak terlepas dari evaluasi terhadap program/kegiatan dan penggunaan anggaran di tahun 2021. Evaluasi Renja 2021 terhadap program/kegiatan, sasaran, indikator kinerja, realisasi capaian kinerja terhadap Renstra, target kinerja, anggaran Renja Sekretaris Daerah, realisasi anggaran pada tahun anggaran 2021 disampaikan pada tabel 2.1

Pada tahun 2021 terdapat sebanyak 8 (delapan) kegiatan yang Realisasinya tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan dan sebanyak 4 (empat puluh satu) kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan namun terdapat 5 (lima) kegiatan diantaranya realisasi capaian melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Sekretariat Daerah pada periode 2021-2026 serta Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah tahun 2021 disajikan pada tabel 2.1.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Kabupaten Balangan

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat Daerah

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2021)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja SKPD pada tahun (2021) (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 (%)	Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
1	3	4	5	7	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7x100%	14 = 12 + 6	15 = 14/5x100%	22
			K	K	K	K	K	K	
		NILAI SAKIP	BB = 78.2	B = 68.4	B = 66.04	96,55	B = 66.04	84,45	Sekretariat Daerah
		Indeks Pelayanan Publik	4,91 (A)	3,01 (-B)	n/a	n/a	n/a	n/a	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,00	82,55	n/a	n/a	n/a	n/a	
		Nilai EKPPD	3,6000	3,5750	3,5620	99,64	3,5620	98,94	
		NILAI SAKIP	BB = 78.2	B = 68.4	B = 66.04	96,55	B = 66.04	84,45	Sekretariat Daerah
		Indeks Pelayanan Publik	4,91 (A)	3,01 (-B)	n/a	n/a	n/a	n/a	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,00	82,55	n/a	n/a	n/a	n/a	

		Nilai EKPPD	3,6000	3,5750	3,5620	99,64	3,5620	98,94	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebijakan di bidang Pengadministrasi Umum yang diimplementasikan/diterapkan oleh SKPD (%)	100	100	100	100,00	100	100	Asisten Administrasi Umum
		Rata-rata Capaian Kinerja SKPD dan Unit Kerja garis koordinasi (%)	100	100	100	100,00	100	100	
1	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentasi dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu (%)	100	100	100	100,00	100	100	Kabag Umum
1	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentasi dokumen perencanaan perangkat daerah yang telah disampaikan tepat waktu (%)	100	100	100	100,00	100	100,00	Kasubbag Keuangan
2	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentasi ketersediaan dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang telah disampaikan tepat waktu (%)	100	100	100	100,00	100	100,00	Kasubbag Keuangan
Rata-rata capaian kinerja						100		100	
Predikat Kinerja						Sangat Baik		Sangat Baik	
2	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku (%)	100	100	100	100,00	100	100	

3	Sub Kegiatan : Peyediaan gaji dan tunjangan ASN	Persentasi ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan (%)	100	100	92	91,88	92	91,88	Subbag Keuangan
4	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentasi dokumen keuangan yang diverifikasi tepat waktu (%)	100	100	100	100,00	100	100,00	Subbag Keuangan
5	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentasi Laporan Keuangan Akhir Tahun sesuai ketentuan perundang-undangan (%)	100	100	100	100,00	100	100,00	Subbag Keuangan
6	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentasi Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran sesuai ketentuan perundang-undangan (%)	100	100	100	100,00	100	100,00	Subbag Keuangan
Rata-rata capaian kinerja						97,97		97,97	
Predikat Kinerja						Sangat Baik		Sangat Baik	
3	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian sesuai SOP	100	100	100	100,00	100	100	

7	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (paket)	1	1	1	100,00	1	100,00	
Rata-rata capaian kinerja						100,00		100,00	
Predikat Kinerja						Sangat Baik		Sangat Baik	
4	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum (%)	100	100	100	100,00	100	100	Bagian Umum
8	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia dan jaringan listrik yang dapat terpenuhi cakupannya (Paket)	13	3	3	100,00	3	23,08	
9	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentasi ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan (%)	100	100	100	100,00	100	100,00	
10	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah pengadaan peralatan rumah tangga Bupati, Wakil Bupati dan Sekda (paket)	6	1	0	0,00	0	0,00	
11	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pelayanan logistik (bulan)	72	12	12	100,00	12	16,67	
12	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pelayanan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dan pengadaan alat tulis kantor (bulan)	72	12	12	100,00	12	16,67	

13	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentasi terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (OP)	2802	467	0	0,00	0	0,00	
Rata-rata capaian kinerja						50,00		23,29	
Predikat Kinerja						Sangat Rendah		Sangat Rendah	
5	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana kantor lingkup Setda yang dapat dipenuhi cakupannya (%)	100	100	100	100,00	100	100	
14	Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (unit)	1	1	1	100,00	1	100,00	
Rata-rata capaian kinerja						100,00		100,00	
Predikat Kinerja						Sangat Baik		Sangat Baik	
6	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (bulan)		12	12	100,00	12	#DIV/0!	
16	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentasi terbayarnya tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (%)	100	100	100	100,00	100	100,00	

17	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Sarpras kantor setda yang dapat dipenuhi cakupannya (bulan)	72	12	12	100,00	12	16,67	
18	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (bulan)	72	12	12	100,00	12	16,67	
Rata-rata capaian kinerja						100,00		44,44	
Predikat Kinerja						Sangat Baik		Sangat Rendah	
7	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (bulan)	72	12	12	100,00	12	17	
19	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Kendaraan Dinas Operasional Layak Fungsi (%)	100	100	0	0,00	0	0,00	
20	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara (bulan)	72	12	0	0,00	0	0,00	
21	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan jasa pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor (%)	100	100	0	0,00	0	0,00	

22	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana gedung kantor/bangunan layak fungsi (%)	100	100	0	0,00	0	0,00	
23	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor/bangunan layak fungsi (%)	100	100	0	0,00	0	0,00	
Rata-rata capaian kinerja						0,00		0,00	
Predikat Kinerja						Sangat Rendah		Sangat Rendah	
8	Kegiatan : Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pimpinan yang dilayani administrasi keuangannya	100	100	100	100,00	100	100	Bagian Umum
24	Sub Kegiatan : Penyediaan gaji dan tunjangan Kepala daerah dan wakil kepala daerah	persentase pelayanan penyediaan gaji dan tunjangan KDH dan WKDH (%)	100	100	58	58,43	58	58,43	subbag Keuangan
25	Sub Kegiatan : Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya untuk KDH & WKDH (stel)	52	2	2	100,00	2	3,85	Subbag perlengkapan dan rumah tangga

27	Sub Kegiatan : Penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah penyerapan Dana Operasional KDH/WKDH (%)	100	100	100	100,00	100	100,00	subbag Keuangan
Rata-rata capaian kinerja						86,14		54,09	
Predikat Kinerja						Tinggi		Sangat Rendah	
9	Kegiatan : Penataan Organisasi	Persentase SKPD yang memiliki nilai budaya kerja baik (SKPD)	50% (15 SKPD)	16,66% (5 SKPD)	43,33	258,10	43,33	86,67	Bagian Organisasi
		Nilai laporan kinerja Pemda	15	12,06	10,56	87,56	10,56	70,40	
		Persentase SKPD dengan kualifikasi nilai SAKIP BB	100% (30 SKPD)	33,33% (10 SKPD)	60,00	180,02	60,00	60,00	
		Indeks kelembagaan	80,1	77,10	79,48	103,08	79,48	99	
		Persentase SKPD dengan dokumen jabatan lengkap (anjab, abk evajab)	100% (30 SKPD)	100% (30 SKPD)	100	100,00	100	100	
		Persentase SKPD yang melaksanakan tata laksana dengan baik	100% (30 SKPD)	100% (30 SKPD)	100	100,00	100	100	

		Persentase bagian pada Setda yang memiliki nilai IKM baik	100% (9 Bagian)	100% (9 Bagian)	n/a	n/a	n/a	n/a	
		Persentase SKPD (Unit Pelayanan Publik) yang memiliki nilai IKM baik	100% (30 SKPD)	100% (30 SKPD)	n/a	n/a	n/a	n/a	
		Persentase SKPD dengan nilai IPP baik	100% (3 SKPD)	100% (2 SKPD)	n/a	n/a	n/a	n/a	
28	Sub Kegiatan : Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah produk hukum terkait penataan dan evaluasi organisasi tupoksi dan uraian tugas	37	37	37	100,00	37	100,00	
		Jumlah SKPD yang memiliki dokumen jabatan lengkap	30	30	30	100,00	30	100,00	
29	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah UPP dengan kriteria pelayanan publik baik	3	2	n/a	n/a	n/a	n/a	
		Jumlah UPP dengan nilai SKM baik	30	30	n/a	n/a	n/a	n/a	
		Jumlah bagian dengan nilai SKM baik (bagian)	9	9	n/a	n/a	n/a	n/a	
		Jumlah SKPD yang menyusun SOP dengan baik dan sesuai aturan (SKPD)	30	30	30	100,00	30	100,00	

30	Sub Kegiatan : Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah SKPD yang memiliki agen perubahan (SKPD)	22	5	0	0,00	0	0,00	
		Jumlah SKPD yang memiliki nilai budaya kerja baik (SKPD)	15	5	13	260,00	13	86,67	
		Jumlah SKPD yang menyusun laporan pengukuran kinerja triwulan dengan baik (SKPD)	30	30	30	100,00	30	100,00	
		Jumlah SKPD yang menyusun laporan kinerja tahunan dengan baik (SKPD)	30	30	30	100,00	30	100,00	
		Jumlah dokumen LKIP yang disusun dengan baik dan sesuai aturan (dokumen)	1	1	1	100,00	1	100,00	
Rata-rata capaian kinerja						107,50		85,83	
Predikat Kinerja						Sangat Baik		Tinggi	
10	Kegiatan : Pelaksanaan Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Kegiatan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang dilayani (%)	100	100	100	100,00	100	100	Kabag Protokol & Komunikasi Pimpinan
		persentase cakupan media informasi komunikasi publik yang mempublikasikan kegiatan pembangunan daerah di Kabupaten Balangan (%)	100	100	100	100,00	100	100	

31	Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Pelayanan Kegiatan Keprotokolan kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (%)	100	100	100	100,00	100	100,00	Kasubbag Protokol
32	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Persentase pelayanan Bahan komunikasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Penyampaian Informasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah di Kabupaten Balangan (%)	100	100	100	100,00	100	100,00	Kasubbag Komunikasi Pimpinan
33	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Persentase Pendokumentasian Kegiatan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (%)	100	100	100	100,00	100	100,00	Kasubbag Dokumentasi Pimpinan
Rata-rata capaian kinerja						100		100	
Predikat Kinerja						Sangat Baik		Sangat Baik	
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan/diterapkan oleh SKPD (%)	100	100	100	100,00	100	100	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		Rata-rata Capaian Kinerja SKPD dan Unit Kerja garis koordinasi (%)	100	100	96,05	96,05	96	96	

11	Kegiatan : Administrasi Tata Pemerintahan	% SKPD yang menyusun bahan LPPD secara sistematis dan data terisi lengkap	100%	100%	100%	100,00	1	100	Bagian Pemerintahan
		% Kecamatan dengan kualitas PATEN predikat Baik	100%	100%	100%	100,00	1	100	
		Jumlah pilar batas daerah sesuai titik koordinat	105	10	12	120,00	12	11	
34	Sub Kegiatan : Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah laporan program/kerja dan permasalahan yang ditindaklanjuti dan/atau dimediasi	72	12	12	100,00	12	16,67	Kasubbag. Administrasi Pemerintahan
		Jumlah laporan kegiatan pelaksanaan peringatan hari jadi Kabupaten Balangan, Peringatan Hari Otonomi Daerah, dan Peringatan HUT RI	18	3	3	100,00	3	16,67	
35	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Rata-rata skor pelayanan PATEN di Kecamatan	3,22	2,991	3	99,47	3	#VALUE!	Kasubbag. Administrasi Kewilayahan
		Jumlah Desa yang penamaan rupabumi sesuai ketentuan	46	6	6	100,00	6	13,04	
		Jumlah pilar batas daerah yang dimonitoring dan evaluasi	105	10	12	120,00	12	11,43	
36	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah SKPD yang Menyampaikan LPPD dan LKPj tepat waktu	100%	100%	100%	100,00	1	100,00	Kasubbag. Kerjasama dan Otonomi Daerah

		Jumlah Laporna SPM yang disampaikan tepat waktu	6	6	6	100,00	6	100,00	
Rata-rata capaian kinerja						102,78		#VALUE!	
Predikat Kinerja						Sangat Baik		#VALUE!	
12	Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	persentase kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang tepat sasaran (%)	100	100	86	85,50	86	86	Kabag Kesejahteraan Rakyat
		Persentase Tempat Ibadah yang berfungsi dengan baik (%)	100	100	96	96,00	96	96	
37	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	persentase sarana peribadatan, sarana pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan yang mendapat rekomendasi bantuan (%)	100	100	77	77,00	77	77,00	Kasubbag Bina Mental spritual
		Jumlah permasalahan kerukunan keagamaan yang dapat dirumuskan kebijakannya (kebijakan)	1	1	1	100,00	1	100,00	
38	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Organisasi keagamaan dan tempat ibadah yang diberikan bantuan hibah (organisasi)	49	76	73	96,05	73	148,98	kasubbag kesejahteraan sosial
		Jumlah Organisasi keagamaan yang diberi bantuan operasional (organisasi)	5	5	5	100,00	5	100,00	

		Jumlah bahan untuk perumusan kebijakan yang tepat sasaran	12	2	2	100,00	2	16,67	
39	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah bahan untuk perumusan kebijakan	12	2	2	100,00	2	16,67	kasubbag kesejahteraan Masyarakat
Rata-rata capaian kinerja						95,51		76,55	
Predikat Kinerja						Sangat Baik		Tinggi	
13	Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase produk hukum yang berhasil di harmonisasikan (%)	100	100	100	100,00	100	100	Kabag Hukum
		persentase kasus/pengaduan yang terselesaikan (%)	100	100	100	100,00	100	100	
		tingkat kepuasan Layanan produk hukum dan informasi hukum (%)	100	100	84	84,15	84	84	
40	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Persentase jumlah produk hukum daerah yang difasilitasi sesuai SOP	100%	100%	100	100,00	100	100,00	Kasubbag Perundang-Undangan
41	Sub Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase penanganan kasus/pengaduan yang tertangani	100%	100%	100	100,00	100	100,00	Kasubbag Bantuan Hukum
		Jumlah pelaporan RANHAM	15	3	3	100,00	3	20,00	

42	Sub Kegiatan : Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk hukum Daerah yang didokumentasi / publikasikan dan dapat di akses (Produk Hukum)	100%	100%	100	100,00	100	100,00	Kasubbag Dokumentasi dan Informasi
Rata-rata capaian kinerja						100		80,00	
Predikat Kinerja						Sangat Baik		Tinggi	
14	Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah dokume kesepakatan kerjasama daerah yang ditindaklanjuti	60	10	11	110,00	11	18	Kabag Pemerintahan
43	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah dokumen Kesepakatan Kerjasama daerah yang di tindak lanjuti	60	10	11	110,00	11	18,33	Kasubbag. Kerjasama dan Otonomi Daerah
Rata-rata capaian kinerja						110,00		18,33	
Predikat Kinerja						Sangat Baik		Sangat Rendah	
3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan di bidang Perekonomian dan Pembangunan yang diimplementasikan/diterapkan oleh SKPD	100	100	100	100,00	100	100	Asisten Perekonomian & Pembangunan
		Rata-rata Capaian Kinerja SKPD dan Unit Kerja garis koordinasi	100	100	101,84	101,84	101,84	101,84	

15	Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase peningkatan pelaksanaan kebijakan sektor perekonomian yang berhasil ditindaklanjuti oleh SKPD terkait (%)	100%	100	100	100,00	100	10.000	Bagian Perekonomian dan SDA
44	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah laporan kebijakan pengelolaan BUMD /BLUD yang direalisasikan dan laporan oleh BUMD /BLUD	24	4	4	100,00	4	16,67	Bagian Perekonomian dan SDA
45	Sub Kegiatan : Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah laporan analisis pengendalian inflasi daerah	24	4	4	100,00	4	16,67	Bagian Perekonomian dan SDA
46	Sub Kegiatan : Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah laporan pengawasan ekonomi mikro	6	1	1	100,00	1	16,67	Bagian Perekonomian dan SDA
Rata-rata capaian kinerja						100,00		16,67	
Predikat Kinerja						Sangat Baik		Sangat Rendah	
16	Kegiatan : Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase telaahan / arahan kebijakan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	100,00	100	100	Bagian Administrasi Pembangunan
		Persentase temuan monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	100,00	100	100	

48	Sub Kegiatan : Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja SKPD berdasarkan Gakor Asisten yang menjadi bahan rakor (laporan)	22	2	2	100,00	2	9,09	Subbag Penyusunan Program
49	Sub Kegiatan : Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah laporan hasil pengendalian pelaksanaan pembangunan (laporan)	22	2	2	100,00	2	9,09	Subbag Pengendalian Program
50	Sub Kegiatan : Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah yang disampaikan tepat waktu (laporan)	22	2	2	100,00	2	9,09	Subbag Evaluasi dan Pelaporan
Rata-rata capaian kinerja						100,00		9,09	
Predikat Kinerja						Sangat Baik		Sangat Rendah	
17	Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pemanfaatan Sistem Pengadaan (%)	100	80	72	90,00	72	72	Kabag Pbj
		Tingkat Kematangan UKPBJ level proaktif (%)	100	66	78	117,85	78	78	
		Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ (%)	50	20	22	108,70	22	43	
51	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan melalui PBJ yang selesai (%)	100	100	79	79,20	79	79,20	
52	Sub Kegiatan : Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Persentase Pemanfaatan aplikasi SPSE dalam PBJ (%)	60	10	36	355,00	36	59,17	

53	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah SDM PBJ yang memiliki kompetensi (orang)	10	5	4	80,00	4	40,00	
Rata-rata capaian kinerja						171,40		59,46	
Predikat Kinerja						Sangat Baik		Rendah	
18	Kegiatan : Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase permasalahan yang berhasil difasilitasi dan ditindaklanjuti (%)	100	100	100	100,00	100	100	Bagian Perekonomian dan SDA
54	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah tindak lanjut rekomendasi hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sektor pertambangan dan lingkungan hidup pada SKPD terkait (rekomendasi)	6	1	1	100,00	1	16,67	Bagian Perekonomian dan SDA
Rata-rata capaian kinerja						100,00		16,67	
Predikat Kinerja						Sangat Baik		Sangat Rendah	
Jumlah Pagu									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM						99,65		99,65	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM						Sangat Baik		Sangat Baik	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: tim kerja yang sinergis				
Faktor penghambat pencapaian kinerja: kurangnya sdm				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : menjaga kekompakan dan sinergitas tim				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya: menambah sdm dan koordinasi				

Berdasarkan tabel evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja perangkat Daerah dan pencapaian Renstra perangkat Daerah s/d tahun 2021 yang disampaikan di atas dapat dijelaskan bahwa 8 (delapan) kegiatan tidak memenuhi target kinerja dan 5 (lima) kegiatan dengan realisasi capaiannya melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan. Adapun rincian kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.

Sebanyak 8 (Delapan) kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran. Sejumlah 8 (delapan) kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin yang tidak menunjang secara langsung pencapaian IKU SKPD sehingga tidak tercapainya target kinerjanya tidak mengganggu capaian kinerja utama Sekretariat Daerah.

2. Realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

Sebanyak 41 (empat puluh satu) kegiatan dalam pelaksanaan telah memenuhi target kinerja yang direncanakan. Adapun kegiatan dengan realisasi kinerja 100% adalah dapat dilihat pada tabel 2.2 analisis pencapaian kinerja pelayanan perangkat Daerah.

3. Realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

Sebanyak 5 (lima) kegiatan yang realisasi capaiannya melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan, yaitu:

- 1) Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
- 2) Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan.
- 3) Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
- 4) Kegiatan kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah.
- 5) Kegiatan penanganan kasus pengaduan hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.

Dari 5 (lima) kegiatan yang capainnya melebihi target di tahun 2020 merupakan kegiatan rutin yang tidak terkait langsung dengan

capaian IKU Sekretariat Daerah. Pencapaian target yang melebihi dari rencana target ini menyebabkan capaian target Renstra sampai dengan tahun 2020 meningkat. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah adalah tercapainya target kinerja lebih cepat dari perencanaan pencapaian target kinerja 5 tahunan.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

- **Penyebab tidak terpenuhinya target adalah sebagai berikut:**
 - Tidak meratanya kemampuan PNS dalam perencanaan di dalam Setda itu sendiri;
 - Rendahnya kemampuan PNS dalam menyusun indikator kinerja yg tepat syarat;
 - Kualitas SPIP di SKPD masih rendah;
 - Pencapaian kinerja masih diukur melalui capaian serapan anggaran bukan hasil/ output dari penggunaan anggaran tersebut;
 - Kebiasaan menunda pekerjaan oleh pelaksanaan program/ kegiatan yang akhirnya menyebabkan pelaksanaan program/ kegiatan terhambat.

- **Penyebab terpenuhinya target kinerja program dan kegiatan adalah sebagai berikut:**
 - Penyusunan perencanaan sudah sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi;
 - Penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien dengan fokus pada pencapaian target kinerja nyata;
 - Dilaksanakannya rencana aksi dan angkas sesuai jadwal yang direncanakan;

- **Penyebab terpenuhinya target kinerja melebihi target kinerja program dan kegiatan adalah sebagai berikut:**
 - Ketidakmampuan dalam menyusun target kinerja di awal Renstra;

- Tidak tersedianya data awal saat menyusun perencanaan target kinerja sehingga menyusun target kinerja;
- Adanya perubahan yang meningkat secara signifikan dari target awal Renja.

Program/ kegiatan yang target kinerjanya tidak tercapai atau melebihi target kinerja program dan kegiatannya tidak menimbulkan implikasi terhadap target capaian program Renstra, dikarenakan program/ kegiatan tersebut diatas merupakan kegiatan rutin yang tidak menunjang secara langsung pencapaian IKU SKPD sehingga tidak mengganggu capaian kinerja utama Sekretariat Daerah.

Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menyusun target kinerja harus sudah di rumuskan dalam *Focus Group Discussion (FGD)* lingkup Sekretariat Daerah;
2. Penggunaan anggaran yang berbasis kinerja;
3. Perlu dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Sesuai dengan isi Peraturan Bupati Balangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah dijelaskan bahwa Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disampaikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yang disajikan melalui tabel 2.2 analisis pencapaian kinerja pelayanan perangkat Daerah.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
Kabupaten Balangan

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Capaian Urusan Pemerintahan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Nilai komponen Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (bobot nilai)			9,00	9,20	9,40	9,60	10,48	10,58	10,58	10,58	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Sekretariat Daerah			85%	88%	90%	90%	82,65%	82,92%	90%	92%	
4	Indeks Reformasi Birokrasi			91,70%	91,75%	91,80%	91,85%	91,75%	91,75%	91,80%	91,85%	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah adalah merupakan unsur pendukung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, dengan cakupan tugas membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan satuan kerja perangkat daerah. Keberadaan Sekretariat Daerah dalam jajaran unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Balangan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pembentukan, dan Susunan Perangkat Daerah. Adapun tugas pokok Sekretariat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah adalah membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

1. Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Sekretariat Daerah.

Sejauh ini kinerja pelayanan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan satuan kerja perangkat daerah. Sekretariat Daerah memiliki peran yang penting dalam proses sinergitas program dan kegiatan pada perangkat daerah di Kabupaten Balangan dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan.

Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah ini terlihat dari pelaksanaan program dan kegiatan yang menuju pada tercapainya tujuan dan sasaran dari Sekretariat Daerah. Yaitu sebagai berikut:

- 1) Sekretariat Daerah berperan dalam melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mana penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan menyampaikan Laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dikelola oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah. Pelaksanaan penyelenggaraan daerah sendiri melakukan penilaian terhadap pencapaian target Indikator Kinerja Kunci (IKK). Yang mana indikator ini tersebar pada seluruh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk dilaksanakan oleh SKPD tersebut dan disampaikan setiap tahun

dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) SKPD dan kemudian dikompilasi menjadi LPPD Kabupaten Balangan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah. LPPD ini juga menjadi dasar dari Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD Kabupaten Balangan terhadap pelaksanaan anggaran setelah tahun anggaran berakhir. LPPD tersebut akan dinilai oleh tim daerah dan tim Nasional. Hasil dari penilaian ini disampaikan dalam bentuk nilai EKPPD yang mana penilaian ini menjadi *gensis* Kepala Daerah di seluruh wilayah Indonesia sebagai hasil prestasi pelaksanaan program kegiatan untuk peningkatan pembangunan daerah.

Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) merupakan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Nilai EKPPD Kabupaten Balangan Tahun 2020 hingga tanggal 17 Juli 2021 belum dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI. Berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi LPPD Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 dan Validasi Terhadap Hasil EPPD Tim Daerah Atas LPPD Kabupaten/ Kota Tahun 2019 Se-Propinsi Kalimantan Selatan tertanggal 2 September 2020 Nilai EKPPD Kabupaten Balangan tahun 2019 adalah 3,5620. Sedangkan nilai EKPPD tahun 2016 adalah 3,1393, tahun 2017 adalah 3,0671, tahun 2018 adalah 3,2946. Nilai EKPPD tahun 2019 meningkat dibandingkan tahun 2018. Keberhasilan pencapaian ini disebabkan oleh komitmen Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Bagian Pemerintahan untuk melakukan verifikasi data IKK yang dikumpul oleh SKPD tepat waktu dan tepat regulasi. Pola pengumpulan data dan pengecekan kebenaran data dukung telah dilakukan oleh Bagian Pemerintahan sesuai dengan SOP dan aturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana kita ketahui bahwa keberhasilan EKPPD mencerminkan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai amanah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- 2) Pelaksanaan program dan kegiatan sebagai bentuk peningkatan pengembangan pembangunan daerah Kabupaten Balangan diukur dengan indikator-indikator utama pada setiap SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah sebagai Bagian di Sekretariat Daerah yang memiliki tugas pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan serta harmonisasi Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKIP) lingkup Kabupaten Balangan. Bagian Organisasi memiliki tugas melakukan harmonisasi LKIP SKPD sebagai bahan penyusunan LKIP Kabupaten. Hasil penilaian LKIP SKPD menjadi tolak ukur pencapaian Visi Misi SKPD tersebut. Sedangkan LKIP Kabupaten menjadi tolak ukur pencapaian Visi Misi Kepala Daerah, yang mana kedua penilaian ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena saling mempengaruhi satu sama lain.

Hasil evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atas pelaporan kinerja Kabupaten Balangan oleh Tim Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Reformasi dan Birokrasi dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Reformasi dan Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Balangan memperoleh nilai 65,45 atau predikat “B” Dibandingkan dengan capaian tahun lalu terdapat peningkatan sebesar 4,29%. Yaitu dari nilai LKIP sebesar 62,64 dengan predikat “B” meningkat menjadi 65,45 dengan predikat “B”.

Nilai LKIP sebesar 62,64 dengan predikat “B” yang didapatkan Kabupaten Balangan di tahun lalu yang menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan capaian kinerjanya, serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil (*outcome*) pada Pemerintah Kabupaten Balangan Hal

tersebut memacu Pemerintah Kabupaten Balangan untuk lebih meningkatkan lagi akuntabilitas kinerjanya di tahun - tahun mendatang;

- 3) Penilaian terhadap Indeks Reformasi Birokrasi oleh Kementrian PAN dan Reformasi Birokrasi adalah dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, maka dipandang perlu melakukan reformasi birokrasi di Pemerintahan Kabupaten Balangan. Perolehan nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2019 sebesar 48.09 yang merupakan angka realisasi hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB (PMPRB) yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Balangan melalui aplikasi PMPRB Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sedangkan berdasarkan hasil evaluasi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia IRB Kabupaten Balangan adalah 51,84 atau kategori CC dngan rincian total komponen pengungkit (A) 20,35 dan total komponen hasil (B) 31,49.

Pelaksanaan reformasi birokrasi yang mulai didengungkan memerlukan perhatian lebih dari semua pihak di Sekretariat Daerah sebagai *leading sector* dan seluruh Pemerintah Kabupaten Balangan. Sejak Tahun 2018 pelaksanaan tahapan reformasi birokrasi di pemerintah Kabupaten Balangan sudah dilaksanakan, dan ini merupakan tantangan tersendiri terhadap Sekretariat Daerah agar dapat benar-benar mempersiapkan implementasi reformasi birokrasi di Kabupaten Balangan melalui Bagian Organisasi Sekretariat. SKPD yang termasuk dalam area perubahan dan tim telah dapat menyusun Dokumen Road Map RB yang meliputi delapan area diantaranya Penataan Kelembagaan, Penataan SDM, Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, Pelayanan Publik tetapi penguatan dalam area perubahan masih ada hal hal yang perlu diperbaiki.

Penilaian terhadap Indeks Reformasi Birokrasi didasarkan dari penilaian komponen pengungkit terdiri atas 8 subtansi atau 8

area perubahan, sedangkan komponen hasil terdiri dari 3 substansi. Adapun penilaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Komponen Penilaian (Pengungkit 60%)	Nilai Maksimal	Hasil PMRRB Inspektorat Kab. Balangan 2020	
			Nilai	%
1.	Manajemen Perubahan	5	1,12	22,40
2.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5	2,09	41,80
3.	Penataan dan Pengutan Organisasi	6	4,50	75,00
4.	Penataan Tatalaksana	5	1,72	34,40
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	15	3,62	24,13
6.	Penguatan Akuntabilitas	6	2,00	33,33
7.	Penguatan Pengawasan	12	4,37	36,41
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6	1,30	21,67
	Jumlah	60	20,72	34,53

No.	Komponen Penilaian (Hasil 40%)	Nilai Maksimal	Hasil PMRRB Inspektorat Kab. Balangan 2020	
			Nilai	%
1.	Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	20	12,37	61,85
2.	Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	10	10	100,00
3.	Kualitas Pelayanan Publik	10	5,00	50,00
	Jumlah	40	27,37	68,43

No.	Komponen Penilaian	Nilai Maksimal	Hasil PMRRB Inspektorat Kab. Balangan 2020	
			Nilai	%
1.	Pengungkit	60	20,72	34,53
2.	Hasil	40	27,37	68,43
	Jumlah	100	48,09	48,09

- 4) Sebagai SKPD yang memberikan pelayanan koordinasi kepada seluruh SKPD di Kabupaten Balangan Sekretariat Daerah melalui 9 (Sembilan) Bagian yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang khas melaksanakan tugas secara maksimal memberikan pendampingan dan pembinaan terkait pelaksanaan program dan kegiatan SKPD sesuai garis koordinasinya masing-masing. Seperti SKPD lain yang juga memberikan pelayanan Sekretariat Daerah juga melaksanakan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat. Sekretariat Daerah tidak hanya sebagai koordinasi pelayanan kepada SKPD terkait pelayanan

Administratif namun juga pelayanan kepada masyarakat umum dalam hal pelayanan sosial seperti Bagian Kesra, Bagian Hukum, Bagian Pengadaan Barang/ Jasa, Bagian Perekonomian dan Bagian Humas.

Penilaian peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Sekretariat Daerah diambil dari rata-rata hasil penilaian pelayanan 9 (Sembilan) Bagian di lingkup Sekretariat Daerah. Capaian pada tahun lalu adalah sebesar 87,37% dari target yang ingin dicapai sebesar 88% dengan capaian indikator adalah 99,28%. Target yang ingin dicapai s.d tahun 2022 adalah IKM terhadap pelayanan Sekretariat daerah sebesar 90%. Sampai dengan tahun 2021 capaian kinerja Renstra (s.d tahun 2021) sudah mencapai 94,97%. Nilai ini didapat dari hasil koesonir yang dibagikan kepada masyarakat penerima pelayanan pada sekretariat daerah dengan menggunakan unsur pelayanan yang berpedoman pada peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB No.14 Tahun 2017. Diharapkan tahun 2021 target capaian IKM pelayanan Sekretariat Daerah sudah dapat mencapai target yang diharapkan. Sekretariat Daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik optimis bahwa pemberian pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan karena Kabupaten Balangan siap unyuk melakukan Penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna.

2. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi SKPD

Pengertian masalah/ hambatan adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan, dengan kata lain merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai tujuan dengan hasil yang maksimal. Permasalahan/ hambatan yang terdapat di Sekretariat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Tidak meratanya sumber daya manusia yang berkualitas terkait dengan pengetahuan dan kemampuan SDM dalam mengidentifikasi dan memahami permasalahan pemerintahan yang berkembang;
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana guna menunjang kelancaran pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pembangunan;
- c. Berubahnya peraturan/ regulasi dan dasar kebijakan yang mengatur tertib administrasi;
- d. Keuangan dengan keterbatasan anggaran dan biaya pendukung tugas dan fungsi;

3. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah tidak lepas dari peran pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terutama SKPD pengampu Visi dan Misi Kepala Daerah tersebut. Sekretariat Daerah sendiri menjadi pengampu Misi 4 Kepala Daerah yakni

” Meningkatkan Kualitas dan Layanan Birokrasi Pemerintahan Sebagai Abdi Masyarakat dan Abdi Negara”

Adapun sasaran yang ingin dicapai Sekretariat Daerah untuk mewujudkan Misi ke-4 Kepala Daerah tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;
- 2) Meningkatnya nilai EKPPD;
- 3) Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi yang baik.

Ketiga sasaran ini dapat dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan dari setiap Bagian pada Sekretariat Daerah. Adapun pengampu dari 3 sasaran ini adalah Bagian Pemerintahan, Bagian Umum dan Bagian Organisasi. Dari seluruh pelaksanaan program/ kegiatan dan sub kegiatan yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran ini semuanya menyajikan capaian 100%. Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Penataan Organisasi;
- 2) Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan;
- 3) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Adapun realisasi capaian kinerja kegiatan prioritas dapat dilihat pada tabel 2.2 Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

4. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat

Pengertian peluang dapat diartikan sebagai kesempatan, kemungkinan untuk menang (mencapai tujuan) untuk mendapatkan keuntungan, atau juga dapat diartikan dengan kesempatan, waktu yang luang. Sedangkan pengertian dari tantangan yaitu perlawanan sesuatu yang berat, yang banyak dikerjakan untuk sesuatu yang menarik, yang menimbulkan semangat/ motivasi untuk melakukan/ mencapai tujuan. Tantangan dan peluang yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu dari dalam (*internal*) dan luar (*eksternal*) organisasi yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Tersedia dan tersebar nya sumber daya manusia/ aparatur dari berbagai macam disiplin ilmu;
- b. Anggaran pendukung pencapaian tugas dan fungsi Sekretariat;
- c. Predikat penyelenggaraan pemerintahan dengan predikat WTP
- d. Kondisi masyarakat yang kondusif di wilayah Kabupaten Balangan;
- e. Perkembangan informasi dan teknologi yang makin pesat dalam mendukung pengelolaan data dan informasi.

5. Formulasi Isu-isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan Strategis Untuk Ditindaklanjuti Dalam Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Formulasi isu-isu penting dalam hal ini berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2022. Berbagai isu strategis yang berkembang dan perlu mendapat perhatian dalam rangka peningkatan kinerja sekretariat daerah antara lain:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip *good governance* dan otonomi daerah yang bertanggungjawab;

- b. Tingginya tuntutan pelayanan publik yang berkualitas berdasarkan sistem dan prosedur yang jelas;
- c. Pelaksanaan kegiatan harus berdasarkan aturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk pembiayaan pembangunan, sehingga diperlukan efisiensi dan efektifitas kinerja serta peningkatan pendapatan daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan termasuk dalam salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Balangan yaitu dalam pencapaian misi meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan dilaksanakan penyesuaian terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kabupaten Balangan.

Rancangan awal RKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 disusun berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 dan membandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 yang berdasarkan pertimbangan atas kinerja pencapaian target Renstra, dan target kinerja yang dicapai oleh Sekretariat Daerah sampai tahun 2021 terkait dengan program prioritas/ kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan. Adapun Hasil analisis kebutuhan terhadap rancangan awal kegiatan tersebut hingga menjadi Renja yang siap untuk difinalisasikan dalam RKPD tersaji pada tabel 2.4.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022
Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balangan	Persentase kebijakan di bidang Pengadministrasi Umum yang diimplementasikan/diterapkan oleh SKPD (%)	100	Rp. 26.551.365.950	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balangan	Persentase kebijakan di bidang Pengadministrasi Umum yang diimplementasikan/diterapkan oleh SKPD (%)	100	Rp. 40.133.380.289	
			Rata-rata Capaian Kinerja SKPD dan Unit Kerja garis koordinasi (%)	100				Rata-rata Capaian Kinerja SKPD dan Unit Kerja garis koordinasi (%)	100		
1	Kegiatan : Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balangan	Persentasi dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu (%)	100	Rp. 221.549.400	Kegiatan : Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balangan	Persentasi dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu (%)	100	Rp. 354.531.650	
1	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Balangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Rp. 194.730.400	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Balangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Rp. 303.191.650	

2	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Balangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Rp. 26.819.000	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Balangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Rp. 51.340.000	
2	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balangan	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku (%)	100	Rp 10.006.480.875	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balangan	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku (%)	100	Rp. 12.709.617.650	
3	Sub Kegiatan : Peyediaan gaji dan tunjangan ASN	Balangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)	12	Rp. 9.916.930.975	Sub Kegiatan : Peyediaan gaji dan tunjangan ASN	Balangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)	12	Rp. 12.565.733.950	
4	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Balangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Rp. 61.114.500	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Balangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Rp. 103.120.000	
5	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Balangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Rp. 16.799.000	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Balangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Rp. 27.838.700	
6	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Balangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	12	Rp. 11.636.400	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Balangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	12	Rp. 12.925.000	

			Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD					Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD			
3	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balangan	Cakupan pelaksanaan administrasi umum (%)	100	Rp. 3.980.940.950	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balangan	Cakupan pelaksanaan administrasi umum (%)	100	Rp. 8.229.900.789	
7	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	Rp. 200.000.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	Rp. 250.000.000	
8	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Rp. 1.049.943.150	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Rp. 1.244.725.000	
9	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Balangan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Rp. 169.513.500	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Balangan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Rp. 369.600.800	
10	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Balangan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Rp. 900.000.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Balangan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Rp. 990.000.000	
11	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Balangan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Rp. 297.292.800	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Balangan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Rp. 403.585.989	
12	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	467	Rp. 1.364.191.500	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	467	Rp. 4.971.989.000	
4	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balangan	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (bulan)	12	Rp. 1.986.895.450	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balangan	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (bulan)	12	Rp. 4.722.899.900	

13	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Rp. 1.111.263.200	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Rp. 2.850.000.000
14	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Rp. 233.065.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Rp. 479.173.900
15	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Balangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Rp. 642.567.250	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Balangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Rp. 1.393.726.000
5	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balangan	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (bulan)	12	Rp. 6.391.047.000	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balangan	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (bulan)	12	Rp. 8.973.592.500
16	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	50	Rp. 1.600.205.050	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	50	Rp. 1.610.660.000
17	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balangan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	Rp. 233.326.250	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balangan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	Rp. 405.730.000

18	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Balangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Rp. 2.404.441.000	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Balangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Rp. 2.964.441.000
19	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Rp. 1.303.789.800	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Rp. 1.803.306.500
20	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Rp 849.284.900	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Rp. 2.189.455.000
6	Kegiatan : Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Balangan	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (bulan)	100	Rp. 1.029.197.800	Kegiatan : Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Balangan	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (bulan)	100	Rp. 1.152.197.800
21	Sub Kegiatan : Penyediaan gaji dan tunjangan Kepala daerah dan wakil kepala daerah	Balangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12	Rp. 260.197.800	Sub Kegiatan : Penyediaan gaji dan tunjangan Kepala daerah dan wakil kepala daerah	Balangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12	Rp. 260.197.800
22	Sub Kegiatan : Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Balangan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1	Rp. 369.000.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Balangan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1	Rp. 492.000.000

	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Balangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Rp. -	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Balangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Rp. -	
23	Sub Kegiatan : Penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	Balangan	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Rp. 400.000.000	Sub Kegiatan : Penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	Balangan	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Rp. 400.000.000	
7	Kegiatan : Penataan Organisasi	Balangan	Persentase SKPD yang memiliki nilai budaya kerja baik (SKPD)	33,33	Rp. 925.890.400	Kegiatan : Penataan Organisasi	Balangan	Persentase SKPD yang memiliki nilai budaya kerja baik (SKPD)	33,33	Rp. 1.190.640.000	
			Nilai laporan kinerja Pemda					Nilai laporan kinerja Pemda			
			Persentase SKPD dengan kualifikasi nilai SAKIP BB	63,33				Persentase SKPD dengan kualifikasi nilai SAKIP BB	63,33		
			Indeks kelembagaan	77,60				Indeks kelembagaan	77,60		
			Persentase SKPD dengan dokumen jabatan lengkap (anjab, abk evajab)	100				Persentase SKPD dengan dokumen jabatan lengkap (anjab, abk evajab)	100		
			Persentase SKPD yang melaksanakan tata laksana dengan baik	100				Persentase SKPD yang melaksanakan tata laksana dengan baik	100		
			Persentase bagian pada Setda yang memiliki nilai IKM baik	100				Persentase bagian pada Setda yang memiliki nilai IKM baik	100		
			Persentase SKPD (Unit Pelayanan Publik) yang memiliki nilai IKM baik	100				Persentase SKPD (Unit Pelayanan Publik) yang memiliki nilai IKM baik	100		
			Persentase SKPD dengan nilai IPP baik	100				Persentase SKPD dengan nilai IPP baik	100		

24	Sub Kegiatan : Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Balangan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1	Rp. 349.149.250	Sub Kegiatan : Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Balangan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1	Rp. 431.587.000
25	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Balangan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2	Rp. 326.060.200	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Balangan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2	Rp. 382.075.000
26	Sub Kegiatan : Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Balangan	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1	Rp. 250.680.950	Sub Kegiatan : Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Balangan	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1	Rp. 376.978.000
8	Kegiatan : Pelaksanaan Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Balangan	Persentase Kegiatan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang dilayani (%)	100	Rp. 1.850.851.125	Kegiatan : Pelaksanaan Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Balangan	Persentase Kegiatan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang dilayani (%)	100	Rp. 2.800.000.000
			persentase cakupan media informasi komunikasi publik yang mempublikasikan kegiatan pembangunan daerah di Kabupaten Balangan (%)	100				persentase cakupan media informasi komunikasi publik yang mempublikasikan kegiatan pembangunan daerah di Kabupaten Balangan (%)	100	
27	Sub Kegiatan : Fasilitasi Keprotokolan	Balangan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	10	Rp. 1.259.556.375	Sub Kegiatan : Fasilitasi Keprotokolan	Balangan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	10	Rp. 1.570.000.000
28	Sub Kegiatan : Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Balangan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	5	Rp. 115.758.000	Sub Kegiatan : Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Balangan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	5	Rp. 585.000.000

29	Sub Kegiatan : Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Balangan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	5	Rp. 634.049.000	Sub Kegiatan : Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Balangan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	5	Rp. 645.000.000	
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Balangan	Persentase kebijakan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan/ diterapkan oleh SKPD (%)	100	Rp. 16.379.925.000	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Balangan	Persentase kebijakan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan/ diterapkan oleh SKPD (%)	100	Rp. 16.379.925.700	
			Rata-rata Capaian Kinerja SKPD dan Unit Kerja garis koordinasi (%)	100				Rata-rata Capaian Kinerja SKPD dan Unit Kerja garis koordinasi (%)	100		
9	Kegiatan : Administrasi Tata Pemerintahan	Balangan	% SKPD yang menyusun bahan LPPD secara sistematis dan data terisi lengkap	100%	Rp. 898.465.000	Kegiatan : Administrasi Tata Pemerintahan	Balangan	% SKPD yang menyusun bahan LPPD secara sistematis dan data terisi lengkap	100%	Rp. 898.465.700	
			% Kecamatan dengan kualitas PATEN predikat Baik	100%				% Kecamatan dengan kualitas PATEN predikat Baik	100%		
			Jumlah pilar batas daerah sesuai titik koordinat	20%				Jumlah pilar batas daerah sesuai titik koordinat	20%		
30	Sub Kegiatan : Penataan Administrasi Pemerintahan	Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1	Rp. 642.467.100	Sub Kegiatan : Penataan Administrasi Pemerintahan	Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1	Rp. 642.467.100	
31	Sub Kegiatan : Pengelolaan Administrasi	Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi	1	Rp. 131.690.000	Sub Kegiatan : Pengelolaan Administrasi	Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi	1	Rp. 131.690.000	

	Kewilayahan					Kewilayahan					
32	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1	Rp. 124.308.600	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1	Rp. 124.308.600	
10	Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Balangan	persentase kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang tepat sasaran (%)	100	Rp. 14.017.637.250	Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Balangan	persentase kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang tepat sasaran (%)	100	Rp. 14.017.637.250	
			Persentase Tempat Ibadah yang berfungsi dengan baik (%)	100				Persentase Tempat Ibadah yang berfungsi dengan baik (%)	100		
33	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1	Rp. 10.078.932.150	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1	Rp. 10.078.932.150	
34	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,	1	Rp. 3.787.358.000	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,	1	Rp. 3.787.358.000	

			Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB					Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB			
35	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1	Rp. 151.347.100	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1	Rp. 151.347.100	
11	Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Balangan	Persentase produk hukum yang berhasil di harmonisasikan (%)	100%	Rp. 960.721.500	Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Balangan	Persentase produk hukum yang berhasil di harmonisasikan (%)	100%	Rp. 960.721.500	
			persentase kasus/pengaduan yang terselesaikan (%)	100%				persentase kasus/pengaduan yang terselesaikan (%)	100%		
			tingkat kepuasan Layanan produk hukum dan informasi hukum (%)	100%				tingkat kepuasan Layanan produk hukum dan informasi hukum (%)	100%		
36	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Balangan	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	1	Rp. 401.570.000	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Balangan	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	1	Rp. 401.570.000	

37	Sub Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Hukum	Balangan	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	1	Rp. 444.832.125	Sub Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Hukum	Balangan	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	1	Rp. 444.832.125	
38	Sub Kegiatan : Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Balangan	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	2	Rp. 114.319.375	Sub Kegiatan : Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Balangan	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	2	Rp. 114.319.375	
12	Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama Daerah	Balangan	Jumlah dokume kesepakatan kerjasama daerah yang ditindaklanjuti	1000	Rp. 503.101.250	Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama Daerah	Balangan	Jumlah dokume kesepakatan kerjasama daerah yang ditindaklanjuti	1000	Rp. 503.101.250	
39	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	10	Rp. 503.101.250	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	10	Rp. 503.101.250	
3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Balangan	Persentase kebijakan di bidang Perekonomian dan Pembangunan yang diimplementasikan/ diterapkan oleh SKPD	100	Rp. 1.528.565.000	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Balangan	Persentase kebijakan di bidang Perekonomian dan Pembangunan yang diimplementasikan/d iterapkan oleh SKPD	100	Rp. 2.691.055.900	
			Rata-rata Capaian Kinerja SKPD dan Unit Kerja garis koordinasi	100				Rata-rata Capaian Kinerja SKPD dan Unit Kerja garis koordinasi	100		

13	Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Balangan	Persentase peningkatan pelaksanaan kebijakan sektor perekonomian yang berhasil ditindaklanjuti oleh SKPD terkait (%)	80	Rp. 507.460.580	Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Balangan	Persentase peningkatan pelaksanaan kebijakan sektor perekonomian yang berhasil ditindaklanjuti oleh SKPD terkait (%)	80	Rp. 547.008.580	
40	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4	Rp. 50.604.000	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4	Rp. 90.152.000	
41	Sub Kegiatan : Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Balangan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4	Rp. 210.139.080	Sub Kegiatan : Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Balangan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4	Rp. 210.139.080	
42	Sub Kegiatan : Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1	Rp. 93.783.560	Sub Kegiatan : Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1	Rp. 93.783.560	
43	Sub Kegiatan : Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pembentukan BLUD	Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1	Rp -	Sub Kegiatan : Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pembentukan BLUD	Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1	Rp -	

44	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1	Rp. 152.933.940	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1	Rp. 152.933.940	
14	Kegiatan : Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Balangan	Persentase telaahan / arahan kebijakan yang ditindaklanjuti (%)	100	Rp. 318.994.560	Kegiatan : Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Balangan	Persentase telaahan / arahan kebijakan yang ditindaklanjuti (%)	100	Rp. 747.924.000	
			Persentase temuan monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah yang ditindaklanjuti (%)	100				Persentase temuan monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah yang ditindaklanjuti (%)	100		
45	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4	Rp. 120.344.400	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4	Rp. 323.394.000	
46	Sub Kegiatan : Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Balangan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4	Rp. 116.050.680	Sub Kegiatan : Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Balangan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4	Rp. 264.315.000	
47	Sub Kegiatan : Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Balangan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4	Rp. 82.599.480	Sub Kegiatan : Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Balangan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4	Rp. 160.215.000	
15	Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Balangan	Pemanfaatan Sistem Pengadaan (%)	100	Rp. 658.067.460	Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Balangan	Pemanfaatan Sistem Pengadaan (%)	100	Rp. 1.316.134.920	
			Tingkat Kematangan UKPBJ level proaktif (%)	88				Tingkat Kematangan UKPBJ level proaktif (%)	88		
			Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ (%)	50				Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ (%)	50		

48	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1	Rp 218.579.820	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1	Rp. 437.159.640	
49	Sub Kegiatan : Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1	Rp. 202.500.000	Sub Kegiatan : Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1	Rp. 405.000.000	
50	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Balangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	10	Rp. 236.987.640	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Balangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	10	Rp. 473.975.280	
16	Kegiatan : Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Balangan	Persentase permasalahan yang berhasil difasilitasi dan ditindaklanjuti (%)	20	Rp. 44.042.400	Kegiatan : Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Balangan	Persentase permasalahan yang berhasil difasilitasi dan ditindaklanjuti (%)	20	Rp. 79.988.400	
51	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1		Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1	Rp. 54.048.400	
52	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Balangan	Jumlah tindak lanjut rekomendasi hasil koordinasi, sinkronisa si dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sektor pertambangan dan lingkungan hidup pada SKPD terkait (rekomendasi)	1	Rp. 44.042.400	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Balangan	Jumlah tindak lanjut rekomendasi hasil koordinasi, sinkronisa si dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sektor pertambangan dan lingkungan hidup pada SKPD terkait (rekomendasi)	1	Rp. 44.042.400	

53	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1	Rp -	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1	Rp. 35.946.000
Jumlah					Rp. 44.459.855.950					Rp. 59.204.361.889

2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Musrenbang Tingkat Kabupaten yang melibatkan unit kerja dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), menghasilkan usulan kebutuhan kegiatan. Hasil itu selanjutnya dibahas lagi dalam Musrenbang dengan stakeholder untuk mengevaluasi apakah usulan tersebut memang merupakan kegiatan yang benar-benar diperlukan di masyarakat. Stakeholder yang terlibat antara lain LSM, perguruan tinggi, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, organisasi profesi, kelompok/ forum informasi masyarakat, dan sebagainya. Peranan Sekretariat Daerah adalah mengoordinasikan usulan-usulan masyarakat yang masuk ke Sekretariat Daerah kepada instansi teknis yang menangani.

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Sekretariat Daerah Tahun 2022

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025, proses pencapaian visi dan misi nasional dilakukan melalui pentahapan 5 (lima) tahunan. Dalam proses tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2016–2021 ini adalah tahapan Pertama dengan penekanan prioritas pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi, serta penguatan daya saing perekonomian.

Pembangunan sebagai usaha untuk mewujudkan kedaulatan sebagai negara merdeka, merupakan upaya membangun kemandirian. Namun, kemandirian yang dimaksudkan bukanlah kemandirian dalam keterisolasian, tetapi didasarkan pada kesadaran akan adanya kondisi saling ketergantungan dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam suatu negara maupun antar bangsa.

Bangsa yang berdaulat dan mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian, mutlak harus dibangun dengan memperkuat kemampuan nasional di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Kemampuan untuk berdaya saing menjadi kunci untuk mencapai kemajuan sekaligus kemandirian. Namun demikian, kemandirian yang dimaksudkan bukanlah kemandirian dalam keterisolasian.

Kemandirian mengenal adanya kondisi saling ketergantungan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam suatu negara maupun bangsa. Terlebih dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam suatu negara maupun bangsa. Terlebih lagi dalam era globalisasi dan perdagangan bebas ketergantungan antar bangsa semakin kuat. Kemandirian yang demikian adalah paham yang proaktif dan bukan reaktif atau defensif. Kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik konstelasinya,

perimbangannya, maupun nilai-nilai yang mendasari dan mempengaruhinya Kemandirian suatu bangsa tercermin, antara lain:

1. Ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya;
2. Kemandirian aparat pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya;
3. Kemampuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang makin kokoh dan berkurangnya ketergantungan kepada sumber luar negeri; dan
4. Kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok, yang disertai dengan keunggulan dalam inovasi, kreativitas, integritas, dan etos kerja sumber daya manusia.

Kemajuan suatu bangsa harus ditandai dengan sumber daya manusia yang memiliki kepribadian bangsa, berakhlak mulia, dan memiliki tingkat pendidikan, produktivitas dan harapan hidup yang tinggi. Bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, meningkatkan pendapatan dan pembagiannya, menyediakan infrastruktur yang baik, serta memiliki sistem dan kelembagaan politik, termasuk hukum, yang berjalan dengan baik. Bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu memberi keadilan bagi seluruh rakyatnya, menjamin hak-hak, keamanan, dan ketenteraman warganya tanpa ada diskriminasi dalam bentuk apapun. Kepribadian dalam kebudayaan harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan, baik hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan. Kemandirian dan kemajuan suatu bangsa tidak boleh hanya diukur dari perkembangan ekonomi semata.

Kemandirian dan kemajuan juga tercermin dalam kelembagaan, pranatapradata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik dan sosial. Secara lebih mendasar lagi, kemandirian sesungguhnya mencerminkan sikap seseorang atau sebuah berbagai tantangan. Karena menyangkut sikap, kemandirian pada dasarnya adalah tantangan.

Masalah kebudayaan dalam arti yang seluasnya dan kemajuan suatu bangsa tidak boleh hanya diukur dari perkembangan ekonomi semata. Kemandirian dan kemajuan juga tercermin dalam kelembagaan, pranatapradata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik dan sosial. Secara lebih mendasar lagi, seluruh

bangsa Indonesia. Pencapaian visi ini akan dilakukan dengan memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, serta pengurangan kesenjangan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Balangan memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Balangan 2021 – 2026 yaitu:

“MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA”

Dengan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan;
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan serta pariwisata kreatif;
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan;
4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara;
5. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif.

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatannya mengacu pada pencapaian misi ke-4 Kabupaten Balangan yaitu:

“Meningkatkan Kualitas dan Layanan Birokrasi Pemerintahan Sebagai Abdi Masyarakat dan Abdi Negara”

Perwujudan pelaksanaan misi ke-4 tersebut menjadi Visi dari Sekretariat Daerah yang juga merupakan visi dari RPJMD 2021-2026 yaitu:

”Membangun Desa, Menata Kota Menuju Balangan Yang Lebih Maju Dan Sejahtera”

Pencapaian Visi Sekretariat Daerah tersebut dengan melaksanakan misi dan tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai, yaitu **terwujudnya tata kelola perumusan kebijakan dan koordinasi pemerintahan yang efektif.**

Indikator Tujuan Sekretariat Daerah sebagai berikut:

1. Nilai SAKIP;
2. Indeks Pelayanan Publik;
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
4. Nilai EKPPD.

Pencapaian tujuan Sekretariat Daerah tersebut tidak lepas dari pencapaian sasaran yang ditetapkan oleh Sekretariat. Adapun Sasaran tersebut adalah **meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi.**

Adapun rincian Tujuan, Sasaran dan Indikator sasaran beserta target disampaikan pada tabel 3.2

Tabel. 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun 2021-2026					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP	B=68,4	BB=70,4	BB=72,4	BB=74,4	BB=76,4	BB=78,2
			Indeks Pelayanan Publik	3,01(-B)	3,40(-B)	3,51(B)	3,80(B)	4,01(-A)	4,91(A)
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,55	83,60	83,70	84	84,50	85
			Nilai EKPPD	3,5750	3,5850	3,5900	3,5930	3,5970	3,6000

3.3. Program dan Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Sekretariat Daerah merupakan program yang disusun berdasarkan kebutuhan akan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Balangan. Sekretariat dalam tugas dan fungsinya sebagai SKPD yang menunjang keberhasilan pencapaian misi ke-4 Kepala Daerah yang tertuang dalam Kebijakan umum dan Program Pembangunan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026.

Program pembangunan daerah adalah program kepala daerah terpilih berupa kumpulan program dan kegiatan prioritas yang berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran. Sekretariat sebagai salah satu SKPD yang mendukung pencapaian misi ke-4 Kepala daerah kabupaten Balangan dapat berfungsi menjadi fasilitator dalam rangka peningkatan pelayanan publik berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM), penyelenggaraan pemerintahan, serta pembangunan menuju kepada *good governance* dan *clear government*. Untuk itu, diperlukan regulasi, sistem, dan budaya kerja bagi aparatur pemerintah daerah yang mampu memberikan kepastian hukum, kemudahan bekerja, kesesuaian pekerjaan dengan tingkat kompetensi, kejelasan jenjang karir serta sistem *reward* dan *punishment* yang tepat dan memadai.

Program dan kegiatan prioritas berdasarkan tujuan dan sasaran serta indikator sasaran RPJMD yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel 3.3

Tabel 3.3

Program Kegiatan Prioritas Pendukung sasaran RPJMD
Kabupaten Balangan Tahun 2022

No.	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja (Outcome)	Target 2022	Sasaran SKPD	IKU SKPD	Target 2022	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Unit Penanggungjawab
1	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi	NILAI SAKIP	BB =70.4	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi	NILAI SAKIP	BB =70.4	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Bagian Organisasi
							Kegiatan: Penataan Organisasi	
							Sub Kegiatan: Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	
		Indeks Pelayanan Publik	3,40 (B)		Indeks Pelayanan Publik	3,40 (B)	Sub Kegiatan: Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83.6		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83.6		
		Nilai EKPPD	3.5850		Nilai EKPPD	3.5850	Program: Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
				Kegiatan: Administrasi Tata Pemerintahan				
				Sub Kegiatan: Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 sudah mengacu kepada Kemendagri 050 Tahun 2021 yang telah menjabarkan semua program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan SKPD pengampu dari program kegiatan yang di maksud, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Balangan.

Rencana kerja berupa program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah tahun 2022. Tahun 2022 Sekretariat Daerah akan melaksanakan 3 (tiga) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 53 (lima puluh tiga) sub kegiatan dengan pagu belanja operasi sebesar **Rp. 50.075.631.165,- (Lima Puluh Miliar Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Seratus Enam Puluh Lima Rupiah)**. Termasuk di dalamnya adalah belanja untuk pemenuhan gaji dan tunjangan baik untuk pegawai Sekretariat Daerah dan untuk Bupati dan Wakil Bupati serta belanja bantuan keuangan hibah untuk organisasi keagamaan di wilayah Pemerintah Kabupaten Balangan di tahun 2022.

Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4
 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah
 Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebijakan di bidang Pengadministrasi Umum yang diimplementasikan/ diterapkan oleh SKPD (%)	Balangan	100	34.960.200.615	APBD BALANGAN		100	36.744.480.598
		Rata-rata Capaian Kinerja SKPD dan Unit Kerja garis koordinasi (%)	Balangan	100				100	

4.01.01.2.01	Kegiatan : Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentasi dokumen perencanaan, penggangan, dan evaluasi perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu (%)	Balangan	100	307.181.400	APBD BALANGAN		100	322.540.470
4.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentasi dokumen perencanaan perangkat daerah yang telah disampaikan tepat waktu (%)	Balangan	100	271.421.450	APBD BALANGAN		100	284.992.523
4.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentasi ketersediaan dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang telah disampaikan tepat waktu (%)	Balangan	100	35.759.950	APBD BALANGAN		100	37.547.948
4.01.01.2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku (%)	Balangan	100	12.681.173.850	APBD BALANGAN		100	13.315.232.543

4.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan : Peyediaan gaji dan tunjangan ASN	Persentasi ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan (%)	Balangan	100	12.565.733.950	APBD BALANGAN		100	13.194.020.648
4.01.01.2.02.03	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentasi dokumen keuangan yang diverifikasi tepat waktu (%)	Balangan	100	81.526.000	APBD BALANGAN		100	85.602.300
4.01.01.2.02.05	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentasi Laporan Keuangan Akhir Tahun sesuai ketentuan perundang-undangan (%)	Balangan	100	22.398.700	APBD BALANGAN		100	23.518.635
4.01.01.2.02.07	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentasi Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran sesuai ketentuan perundang-undangan (%)	Balangan	100	11.515.200	APBD BALANGAN		100	12.090.960
4.01.01.2.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum (%)	Balangan	100	4.941.254.639	APBD BALANGAN		100	5.188.317.371

4.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia dan jaringan listrik yang dapat terpenuhi cakupannya (Paket)	Balangan	3	200.000.000	APBD BALANGAN		3	210.000.000
4.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentasi ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan (%)	Balangan	100	1.399.924.200	APBD BALANGAN		100	1.469.920.410
4.01.01.2.06.03	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah pengadaan peralatan rumah tangga Bupati, Wakil Bupati dan Sekda (paket)	Balangan	1	226.018.000	APBD BALANGAN		1	237.318.900
4.01.01.2.06.04	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pelayanan logistik (bulan)	Balangan	12	900.000.000	APBD BALANGAN		12	945.000.000
4.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pelayanan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dan pengadaan alat tulis kantor (bulan)	Balangan	12	396.390.439	APBD BALANGAN		12	416.209.961
4.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentasi terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (OP)	Balangan	467	1.818.922.000	APBD BALANGAN		467	1.909.868.100

4.01.01.2.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (bulan)	Balangan	12	3.315.860.650	APBD BALANGAN		12	3.481.653.683
4.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentasi terbayarnya tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (%)	Balangan	100	1.881.684.300	APBD BALANGAN		100	1.975.768.515
4.01.01.2.08.03	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Sarpras kantor setda yang dapat dipenuhi cakupannya (bulan)	Balangan	12	310.753.350	APBD BALANGAN		12	326.291.018
4.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (bulan)	Balangan	12	1.123.423.000	APBD BALANGAN		12	1.179.594.150
4.01.01.2.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (bulan)	Balangan	12	9.168.840.376	APBD BALANGAN		12	9.627.282.395
4.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Persentase Kendaraan Dinas Operasional Layak Fungsi (%)	Balangan	100	2.154.383.000	APBD BALANGAN		100	2.262.102.150

	Jabatan								
4.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara (bulan)	Balangan	12	284.435.000	APBD BALANGAN		12	298.656.750
4.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan jasa pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor (%)	Balangan	100	3.859.255.932	APBD BALANGAN		100	4.052.218.729
4.01.01.2.09.10	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana gedung kantor/bangunan layak fungsi (%)	Balangan	100	1.738.386.500	APBD BALANGAN		100	1.825.305.825
4.01.01.2.09.11	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor/bangunan layak fungsi (%)	Balangan	100	1.132.379.944	APBD BALANGAN		100	1.188.998.941
4.01.01.2.11	Kegiatan : Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pimpinan yang dilayani administrasi keuangannya	Balangan	100	1.152.197.800	APBD BALANGAN		100	1.189.807.690

4.01.01.2.11.01	Sub Kegiatan : Penyediaan gaji dan tunjangan Kepala daerah dan wakil kepala daerah	persentase pelayanan penyediaan gaji dan tunjangan KDH dan WKDH (%)	Balangan	100	260.197.800	APBD BALANGAN		100	273.207.690
4.01.01.2.11.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya untuk KDH & WKDH (stel)	Balangan	2	492.000.000	APBD BALANGAN		2	516.600.000
4.01.01.2.11.04	Sub Kegiatan : Penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah penyerapan Dana Operasional KDH/WKDH (%)	Balangan	100	400.000.000	APBD BALANGAN		100	400.000.000
4.01.01.2.13	Kegiatan : Penataan Organisasi	Persentase SKPD yang memiliki nilai budaya kerja baik (SKPD)	Balangan	26,66% (8 SKPD)	925.890.400	APBD BALANGAN		26,66% (8 SKPD)	1.028.454.873
		Nilai laporan kinerja Pemda	Balangan	12,8				12,8	
		Persentase SKPD dengan kualifikasi nilai SAKIP BB	Balangan	46,66% (14 SKPD)				46,66% (14 SKPD)	
		Indeks kelembagaan	Balangan	77,30				77,30	
		Persentase SKPD dengan dokumen jabatan lengkap (anjab, abk evajab)	Balangan	100% (30 SKPD)				100% (30 SKPD)	

		Persentase SKPD yang melaksanakan tata laksana dengan baik	Balangan	100% (30 SKPD)				100% (30 SKPD)	
		Persentase bagian pada Setda yang memiliki nilai IKM baik	Balangan	100% (9 Bagian)				100% (9 Bagian)	
		Persentase SKPD (Unit Pelayanan Publik) yang memiliki nilai IKM baik	Balangan	100% (30 SKPD)				100% (30 SKPD)	
		Persentase SKPD dengan nilai IPP baik	Balangan	100% (2 SKPD)				100% (2 SKPD)	
4.01.01.2.13.01	Sub Kegiatan : Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah produk hukum terkait penataan dan evaluasi organisasi tupoksi dan uraian tugas	Balangan	36	349.149.250	APBD BALANGAN		36	366.606.713
		Jumlah SKPD yang memiliki dokumen jabatan lengkap	Balangan	30				30	
4.01.01.2.13.02	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah UPP dengan kriteria pelayanan publik baik	Balangan	2	326.060.200	APBD BALANGAN		2	342.363.210
		Jumlah UPP dengan nilai SKM baik	Balangan	30				30	

		Jumlah bagian dengan nilai SKM baik (bagian)	Balangan	9 Bagian				9 Bagian	
		Jumlah SKPD yang menyusun SOP dengan baik dan sesuai aturan (SKPD)	Balangan	30 SKPD				30 SKPD	
4.01.01.2.13.03	Sub Kegiatan : Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah SKPD yang memiliki agen perubahan (SKPD)	Balangan	8 SKPD	250.680.950	APBD BALANGAN		8 SKPD	319.484.950
		Jumlah SKPD yang memiliki nilai budaya kerja baik (SKPD)	Balangan	8 SKPD				8 SKPD	
		Jumlah SKPD yang menyusun laporan pengukuran kinerja triwulan dengan baik (SKPD)	Balangan	30 SKPD				30 SKPD	
		Jumlah SKPD yang menyusun laporan kinerja tahunan dengan baik (SKPD)	Balangan	30 SKPD				30 SKPD	
		Jumlah dokumen LKIP yang disusun dengan baik dan sesuai aturan (dokumen)	Balangan	1 Dokumen				1 Dokumen	

4.01.01.2.14	Kegiatan : Pelaksanaan Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Kegiatan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang dilayani (%)	Balangan	100	2.467.801.500	APBD BALANGAN		100	2.591.191.575
		persentase cakupan media informasi komunikasi publik yang mempublikasikan kegiatan pembangunan daerah di Kabupaten Balangan (%)	Balangan	100				100	
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Pelayanan Kegiatan Keprotokolan kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (%)	Balangan	100	1.679.408.500	APBD BALANGAN		100	1.763.378.925
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Persentase pelayanan Bahan komunikasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Penyampaian Informasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah di Kabupaten Balangan (%)	Balangan	100	154.344.000	APBD BALANGAN		100	162.061.200

4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Persentase Pendokumentasian Kegiatan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Balangan	100	634.049.000	APBD BALANGAN	100	665.751.450
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan/diterapkan oleh SKPD (%)	Balangan	100	13.875.742.600	APBD BALANGAN	100	14.569.529.730
		Rata-rata Capaian Kinerja SKPD dan Unit Kerja garis koordinasi (%)	Balangan	100			100	
4.01.02.2.01	Kegiatan : Administrasi Tata Pemerintahan	% SKPD yang menyusun bahan LPPD secara sistematis dan data terisi lengkap	Balangan	100%	718.772.600	APBD BALANGAN	100%	754.711.230
		% Kecamatan dengan kualitas PATEN predikat Baik	Balangan	100%			100%	
		Jumlah pilar batas daerah sesuai titik koordinat	Balangan	15			15	

4.01.02.2.01.01	Sub Kegiatan : Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah laporan program/kerja dan permasalahan yang ditindaklanjuti dan/atau dimediasi	Balangan	12	513.973.700	APBD BALANGAN		12	539.672.385
		Jumlah laporan kegiatan pelaksanaan peringatan hari jadi Kabupaten Balangan, Peringatan Hari Otonomi Daerah, dan Peringatan HUT RI	Balangan	3				3	
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Rata-rata skor pelayanan PATEN di Kecamatan	Balangan	3.05	105.352.000	APBD BALANGAN		3.05	110.619.600
		Jumlah Desa yang penamaan rupabumi sesuai ketentuan	Balangan	8				8	
		Jumlah pilar batas daerah yang dimonitoring dan evaluasi	Balangan	15				15	
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah SKPD yang Menyampaikan LPPD dan LKPj tepat waktu	Balangan	100%	99.446.900	APBD BALANGAN		100%	104.419.245
		Jumlah Laporna SPM yang disampaikan tepat waktu	Balangan	6				6	

4.01.02.2.02	Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	persentase kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang tepat sasaran (%)	Balangan	100	11.985.911.800	APBD BALANGAN		100	12.585.207.390
		Persentase Tempat Ibadah yang berfungsi dengan baik (%)	Balangan	100				100	
4.01.02.2.02.01	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	persentase sarana peribadatan, sarana pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan yang mendapat rekomendasi bantuan (%)	Balangan	100	8.377.476.050	APBD BALANGAN		100	8.796.349.853
		Jumlah permasalahan kerukunan keagamaan yang dapat dirumuskan kebijakannya (kebijakan)	Balangan	1				1	

4.01.02.2.02.02	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Organisasi keagamaan dan tempat ibadah yang diberikan bantuan hibah (organisasi)	Balangan	45	3.487.358.000	APBD BALANGAN		45	3.661.725.900
		Jumlah Organisasi keagamaan yang diberi bantuan operasional (organisasi)	Balangan	5				5	
		Jumlah bahan untuk perumusan kebijakan yang tepat sasaran	Balangan	2				2	
4.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah bahan untuk perumusan kebijakan	Balangan	2	121.077.750	APBD BALANGAN		2	127.131.638
4.01.02.2.03	Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase produk hukum yang berhasil di harmonisasikan (%)	Balangan	100	768.577.200	APBD BALANGAN		100	807.006.060

		persentase kasus/pengaduan yang terselesaikan (%)	Balangan	100				100	
		tingkat kepuasan Layanan produk hukum dan informasi hukum (%)	Balangan	100				100	
4.01.02.2.03.01	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Persentase jumlah produk hukum daerah yang difasilitasi sesuai SOP	Balangan	100%	321.256.000	APBD BALANGAN		100%	337.318.800
4.01.02.2.03.02	Sub Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase penanganan kasus/pengaduan yang tertangani	Balangan	100%	355.865.700	APBD BALANGAN		100%	373.658.985
		Jumlah pelaporan RANHAM	Balangan	3				3	
4.01.02.2.03.03	Sub Kegiatan : Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk hukum Daerah yang didokumentasi / publikasikan dan dapat di akses (Produk Hukum)	Balangan	100%	91.455.500	APBD BALANGAN		100%	96.028.275
4.01.02.2.04	Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah dokume kesepakatan kerjasama daerah yang ditindaklanjuti	Balangan	10	402.481.000	APBD BALANGAN		10	422.605.050

4.01.02.2.04.01	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah dokumen Kesepakatan Kerjasama daerah yang di tindak lanjuti	Balangan	10	402.481.000	APBD BALANGAN		10	422.605.050
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan di bidang Perekonomian dan Pembangunan yang diimplementasikan/ diterapkan oleh SKPD	Balangan	100%	1.239.687.950	APBD BALANGAN		100%	1.301.672.348
		Rata-rata Capaian Kinerja SKPD dan Unit Kerja garis koordinasi	Balangan	100%				100%	
4.01.03.2.01	Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase peningkatan pelaksanaan kebijakan sektor perekonomian yang berhasil ditindaklanjuti oleh SKPD terkait (%)	Balangan	80%	388.767.600	APBD BALANGAN		80%	408.205.980
4.01.03.2.01.01	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah laporan kebijakan pengelolaan BUMD /BLUD yang direalisasikan dan laporan oleh BUMD /BLUD	Balangan	4	42.170.000	APBD BALANGAN		4	44.278.500

4.01.03.2.01.02	Sub Kegiatan : Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah laporan analisis pengendalian inflasi daerah	Balangan	4	175.115.900	APBD BALANGAN		4	183.871.695
4.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan : Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah laporan pengawasan ekonomi mikro	Balangan	1	44.036.750	APBD BALANGAN		1	46.238.588
4.01.03.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah laporan koordinasi,sinkronis asi, evaluasi pendirian BUMD	Balangan	1	127.444.950	APBD BALANGAN		1	133.817.198
4.01.03.2.02	Kegiatan : Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase telaahan / arahan kebijakan yang ditindaklanjuti (%)	Balangan	100	265.828.800	APBD BALANGAN		100	279.120.240
		Persentase temuan monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah yang ditindaklanjuti (%)	Balangan	100				100	
4.01.03.2.02.01	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja SKPD berdasarkan Gakor Asisten yang menjadi bahan rakor (laporan)	Balangan	4	100.287.000	APBD BALANGAN		4	105.301.350

4.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan : Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah laporan hasil pengendalian pelaksanaan pembangunan (laporan)	Balangan	4	96.708.900	APBD BALANGAN		4	101.544.345
4.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan : Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah yang disampaikan tepat waktu (laporan)	Balangan	4	68.832.900	APBD BALANGAN		4	72.274.545
4.01.03.2.03	Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pemanfaatan Sistem Pengadaan (%)	Balangan	80	548.389.550	APBD BALANGAN		80	575.809.028
		Tingkat Kematangan UKPBJ level proaktif (%)	Balangan	77				77	
		Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ (%)	Balangan	50				50	
4.01.03.2.03.01	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan melalui PBJ yang selesai (%)	Balangan	100	182.149.850	APBD BALANGAN		100	191.257.343
4.01.03.2.03.02	Sub Kegiatan : Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Persentase Pemanfaatan aplikasi SPSE dalam PBJ (%)	Balangan	20	168.750.000	APBD BALANGAN		80	177.187.500

4.01.03.2.03.03	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah SDM PBJ yang memiliki kompetensi (orang)	Balangan	6	197.489.700	APBD BALANGAN		50	207.364.185
4.01.03.2.04	Kegiatan : Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase permasalahan yang berhasil difasilitasi dan ditindaklanjuti (%)	Balangan	100	36.702.000	APBD BALANGAN		100	38.537.100
4.01.03.2.04.02	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah tindak lanjut rekomendasi hasil koordinasi, sinkronis asi dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sektor pertambangan dan lingkungan hidup pada SKPD terkait (rekomendasi)	Balangan	1	36.702.000	APBD BALANGAN		1	38.537.100

Paringin, Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. Sutikno, AP., M.AP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19760417 199412 1 001

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2022 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Sekretariat Daerah pada tahun 2022, sehingga dapat lebih terarah dan terukur. Diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan yang mana hal tersebut merupakan hal yang dapat menjadi penentu keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun.

Seluruh pihak khususnya jajaran ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan perlu mencermati berbagai rambu dan *guidance* di dalam melaksanakan tugas serta mengemban tanggung jawabnya. Pelaksanaan tugas harus fokus pada upaya mencapai tujuan dan sasaran, serta berusaha mewujudkan visi organisasi.

Akhir kata, semoga penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022 ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *public service* yang lebih baik.

Demikian Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022 ini disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.

Paringin, 2022

SEKRETARIS DAERAH,

H. Sutikno, Ap., M.AP

Pembina Utama Madya (IV/D)

NIP. 19760417 199412 1 001